

BAB III

KONDISI BANGSA INDONESIA TAHUN 1928-1959

A. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kedudukan perempuan. Melalui pendidikan memungkinkan kaum perempuan untuk menegaskan hak-hak dasar mereka, untuk melatih kaum perempuan secara bijaksana dan untuk bisa berkarya bagi perluasan ide-ide mereka. Meskipun perempuan memiliki kewajiban sebagai seorang istri dan ibu sesuai kodrat mereka sebagai perempuan, namun tetap harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki agar dapat mengembangkan pemikiran serta gagasan yang cemerlang.

Pada awal abad 20, bagi perempuan saat itu masih belum mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan yang setara dengan laki-laki bahkan pada saat itu, hanya perempuan pribumi priyayi yang dapat memperoleh pendidikan. Dari pendidikan inilah kemudian menghasilkan para pemuda pelajar Indonesia yang berhasil menyusun suatu konsep nasionalisme Indonesia

dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.¹ Peristiwa ini dapat dimaknai sebagai momentum awal dari bulatnya tekad para pemuda Indonesia untuk mengakhiri masa ketertindasan yang telah berjalan selama beratus-ratus tahun di bawah kekuasaan pemerintah kolonial saat itu.²

Kemudian pendidikan bagi perempuan dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada tanggal 22-25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini merupakan sebuah usaha untuk melakukan peningkatan pendidikan bagi anak-anak perempuan dengan melakukan pembahasan mengenai rencana mendirikan sekolah-sekolah perempuan.³

¹ Subagio Reksodipuro, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, (Jakarta: Yayasan Gedung Bersejarah, 1974), p.171.

² Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), p.518

³ Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV, 2007), p. 148

Berikut ini perbandingan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin pada *Hollands Inlandsche School* (HIS):

Tahun	Siswa laki-laki	Siswa Perempuan
1915	18.970	3.490
1925	28.722	10.195
1929-1930	29.984	11.917
1934-1935	31.231	15.492
1939-1940	34.307	19.605
Total	143.214	60.699

Pada tabel diatas nampak bahwa jumlah siswa laki-laki di *Holland Inlandsche School* (HIS) lebih banyak daripada siswa perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan daripada kaum perempuan. Untuk dapat bersekolah di pendidikan formal yang didirikan oleh Belanda salah satu syaratnya harus bisa berbahasa Belanda, karena bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar. Sehingga kebanyakan yang dapat bersekolah adalah kaum elit bumiputera.

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang jauh lebih buruk dari sebelumnya ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

Masalah pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia menunjukkan gambaran yang buruk. Hal ini dapat dilihat jika dibandingkan dengan pemerintah Belanda di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, jumlah sekolah rendah menurun dari 21.500 menjadi 13.500, dan sekolah menengah pertama dari 850 menjadi 20. Jumlah siswa di sekolah turun tajam sebesar 30%, terutama siswa sekolah menengah atas yang turun hingga 90%. Selain itu, guru di sekolah rendah mengalami penurunan sebesar 35%, dan guru sekolah menengah yang masih aktif hanya 5%.⁴ Hal ini membuat angka buta huruf pada masa pendudukan Jepang sangat tinggi, meskipun upaya pemberantasan buta huruf telah dilakukan.

Tujuan umum pendidikan pasca Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak memberikan pengetahuannya kepada

⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), p. 170

negara. Artinya, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.⁵

Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas empat tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, sejumlah 24.775 buah sekolah tercatat di seluruh Indonesia.⁶

B. Kondisi Ekonomi

Perkembangan yang sangat pesat di bidang industri perkebunan ditandai dengan banyaknya ekspor-impor maupun transaksi semacamnya yang dilakukan di wilayah ini.⁷ Krisis ekonomi atau lebih dikenal dengan krisis ekonomi tahun 1930-an ini melanda Indonesia kurang lebih 6 tahun lamanya. Hal ini tampak paada perusahaan-perusahaan besar yang terkena imbasnya, mereka terpaksa melakukan penurunan upah buruh dan

⁵ Syaharudin dan Heri Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2019), p.65

⁶ Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 139

⁷ Marwati Djoened P dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), p. 86

pemecatan secara besar-besaran. Akibatnya menambah penderitaan bagi rakyat kecil.⁸

Kondisi tersebut kemudian menjadi pembahasan pada Kongres Perempuan Indonesia Kedua tahun 1935. Pada kongres kedua ini soal buruh perempuan yang mendapat perhatian lebih, hal ini dikarenakan buruh perempuan diperlakukan tidak wajar. Pembahasan yang ditetapkan pada kongres kedua ini kemudian didirikan Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI) pada tahun 1937.⁹

Pada awal kekuasaan Jepang, wilayah Indonesia yang menjadi objek-objek vital seperti kota-kota besar di Indonesia dan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapat menghasilkan pendapatan negara dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, pada saat awal pendudukan Jepang hampir seluruh

⁸ Anne booth, *Sejarah Ekonomi Indoneesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), p. 89

⁹ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), p.56

kehidupan ekonomi tidak berjalan. Kehidupan ekonomi berubah dari keadaan normal menjadi ekonomi perang.¹⁰

Hal pertama yang dilakukan Jepang untuk mengatasi masalah ini adalah memperbaiki prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, telekomunikasi dan lain-lain yang bersifat fisik. Selain itu, Jepang juga menyita sejumlah aset-aset pemerintah kolonial Belanda, seperti perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik, bank dan perusahaan-perusahaan vital seperti pertambangan listrik, telekomunikasi dan perusahaan transportasi.¹¹

Keadaan perekonomian Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan cukup mengalami kemerosotan dengan adanya inflasi dan pemerintah tidak mampu mengendalikan mata uang asing yang beredar di Indonesia khususnya mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Akibatnya, kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil begitu juga dengan pajak.¹²

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), p. 141

¹¹ Djoened, *Sejarah Nasional...*, p. 142

¹² M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), p. 475.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan mengadakan konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah upaya peningkatan produksi dan cara distribusi pangan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan swasta asing.¹³

C. Kondisi Politik

Pada tahun 1931 Gubernur Jendral de Jonge membuka halaman baru dalam politik kolonial di Indonesia, tindakan Gubernur Jendral de Jonge bersifat sangat reaksioner disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia. Gubernur Jendral de Jonge membatasi pergerakan nasional, salah satunya mengenai peraturan larangan untuk berkumpul. Dengan demikian, artinya organisasi-organisasi atau partai-partai tidak dapat mengumpulkan anggotanya, selain itu Gubernur Jendral de Jonge memberi hukuman bagi pegawai yang bergabung dengan

¹³ Soemitro Djojohadi Koesoemo, *Beberapa Soal Keuangan*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1947), p. 27

kegiatan nasional yang radikal. Politik menindas juga diterapkan terhadap partai-partai yang bersikap non kooperatif.¹⁴

Pada tahun 1934, tokoh-tokoh nasional ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tuduhan menghasut untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya penangkapan terhadap tokoh PNI pada tanggal 25 Januari 1934, Moh. Hatta dan Sutan Syahrir ditangkap di Jakarta dan dimasukkan ke dalam penjara Glodok. Kemudian berdasarkan perintah Gubernur Hindia Belanda tanggal 16 November 1934 Moh. Hatta dan Sutan Syahrir diasingkan ke Digul. Sebelumnya, Ir. Soekarno sudah terlebih dahulu diasingkan ke Digul.¹⁵

Penangkapan dan pembuangan terhadap pemimpin-pemimpin terkemuka pergerakan nasional mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1933. Hampir seluruh pemimpin pergerakan terkemuka telah ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini berlangsung sampai

¹⁴ Sagimun M.D, *Perlawanan dan pengasingan pergerakan nasional*, (Jakarta: Pt Royal Standar, 1986), p. 59

¹⁵ Sagimun M.D, *Perlawanan dan pengasingan*, p.60

saat terakhir berkuasanya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.¹⁶

Selanjutnya pemerintah Jepang melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret tahun 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan seluruh organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1942,¹⁷ Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.¹⁸

Sejak masuknya Jepang ke Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi bahkan pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun bersifat sosial, ekonomi dan agama. Organisasi-organisasi tersebut dihapuskan dan digantikan dengan organisasi buatan Jepang. Sehingga kehidupan politik pada saat itu diatur oleh Jepang.¹⁹

¹⁶ Sagimun M.D, *Perlawanan dan pengasingan*, p.68

¹⁷ UU No. 2 tahun 1942 merupakan aturan tentang larangan berserikat dan berkumpul pada masa pendudukan Jepang di Indonesia

¹⁸ Hendri F. Isnaeni dan Apid, *Romusa Sejarah Yang Terlupakan* (Yogyakarta: Ombak, 2008), p. 30.

¹⁹ Jonar T.H. Situmorang, *Bung Karno Biografi Sang Fajar*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), p. 122

Keadaan dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintah yang mana sebelumnya dipimpin oleh Jepang yang menduduki Indonesia setelah Belanda.

Langkah pertama adalah dengan melakukan sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda pertama adalah mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan agenda yang lebih luas yaitu pembentukan perangkat negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama Republik Indonesia, pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/ TKR dan lain-lain.²⁰

Sejak tahun 1950 Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh parlementer barat,

²⁰ Saafroedin Bahar, *Risalah Sidang BPUPK dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995), p.370

sehingga masa ini disebut masa demokrasi liberal. Di Indonesia, demokrasi liberal mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Setelah dikeluarkannya dekrit presiden, secara formal demokrasi liberal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959.²¹

Pada tahun 1955, pemilihan umum pertama kali diadakan di pemerintahan Indonesia dengan harapan tercapainya pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan umum yang pertama ini diadakan dua kali pemilihan yaitu yang pertama, pemilihan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Kedua, pemilihan anggota Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.²²

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 198.

²² ANRI, *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999*, (Jakarta: Arsip Nasional RI, 2015), p.8